

Ketimpangan Dan Mobilitas Sosial Dalam Pendidikan

Sandi¹, Nurullayali Azzahro², Asep Mulyana³, Sinta Khoiril Bariyyah⁴

¹ Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

² Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³ Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

⁴ Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: sandi15@guru.smp.belajar.id, nurullayaliaz@gmail.com, asepmulyana@uinssc.ac.id,
skhoirilbarriyah@mail.uinssc.ac.id

ABSTRAK

Ketimpangan sosial di bidang pendidikan tetap menjadi masalah mendasar yang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan seharusnya berperan sebagai alat untuk pergerakan sosial dan penyamaan peluang, tetapi kenyataannya, akses, mutu, dan capaian pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh aspek ekonomi, lokasi geografis, norma budaya, serta regulasi pendidikan. Situasi ini menciptakan perbedaan kesempatan di antara berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kedudukan sosial melalui pendidikan. Kajian ini bermaksud untuk menelaah jenis ketimpangan sosial dalam pendidikan, penyebabnya, serta kaitannya dengan peluang pergerakan sosial di Indonesia. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui pengkajian buku, jurnal akademik, temuan riset, serta dokumen resmi dari pemerintah dan organisasi internasional yang terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan mempertegas pembagian lapisan sosial dan menghambat pergerakan sosial bagi kelompok dengan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang terbatas. Sebaliknya, kelompok dengan sumber daya yang lebih memadai umumnya memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan atau menaikkan posisinya. Dengan demikian, perlu adanya upaya penyamaan akses, peningkatan kualitas pendidikan, serta langkah-langkah kebijakan afirmatif guna membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan mendorong pergerakan sosial untuk semua warga negara.

Kata Kunci: Ketimpangan Sosial; Pergerakan Sosial; Akses dan Keadilan Sosial

ABSTRACT

Social inequality in education remains a fundamental issue that significantly affect individuals' ability to access quality learning opportunities. Ideally, education serves as a tool for social mobility and equal opportunity; however, in reality, access, quality, and learning outcomes in Indonesia continue to be influenced by economic conditions, geographic location, cultural norms, and educational regulations. This situation creates unequal opportunities among different social groups to improve their social standing through education. This study aims to examine forms of social inequality in education, its contributing factors, and its relationship to social mobility in Indonesia. The research employs a library research approach using a descriptive qualitative method. Data were collected through the review of academic books, scholarly journals, research findings, and official documents from the government and relevant international organizations. The findings reveal that educational inequality reinforces social stratification and restricts upward mobility for individuals with limited economic, social, and cultural capital. Conversely, groups with greater resources tend to have wider access and opportunities to maintain or improve their social status. Therefore, equitable access, improved educational quality, and affirmative policy actions are necessary to build an inclusive and just education system that supports social mobility for all citizens.

Keywords: *Social Inequality, Social Movement, Access and Social Justice*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial karena berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang mobilitas sosial. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan, nilai, dan modal budaya yang memungkinkan individu meningkatkan posisinya dalam struktur sosial. Mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal menjadi indikator sejauh mana pendidikan mampu berperan sebagai instrumen kemajuan sosial. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pendidikan yang menjadi sarana utama untuk meningkatkan status sosial melalui pencapaian akademik; pekerjaan yang ditentukan oleh keterampilan serta akses terhadap lapangan kerja formal; koneksi sosial yang dapat membuka peluang ekonomi dan posisi sosial; serta kebijakan pemerintah yang mendukung mobilitas melalui program afirmatif, jaminan sosial, dan bantuan pendidikan (Novirsari, 2025). Ketika pemerataan akses dan kualitas pendidikan terjamin, mobilitas sosial dapat berlangsung secara inklusif dan berkeadilan; sebaliknya, ketimpangan pendidikan justru memperdalam jurang sosial dan menghambat pergerakan antargenerasi.

Dalam kajiannya, Amrullah, Humaedah, & Arifin (2025) menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalur formal yang paling efektif dalam meningkatkan status sosial seseorang karena jenjang pendidikan yang lebih tinggi berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan dan posisi sosial yang dapat dicapai. Namun ia juga menyoroti fakta bahwa pendidikan menengah tidak lagi menjadi jaminan mobilitas sosial, sementara akses ke pendidikan tinggi masih didominasi kelompok dengan modal ekonomi kuat. Kendala struktural seperti mahalnya biaya pendidikan, disparitas kualitas lembaga, dan ketimpangan wilayah menjadikan fungsi pendidikan sebagai mekanisme mobilitas sosial tidak berjalan optimal. Temuan Nudin (2025) menguatkan pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi, geografis, dan sosial budaya berpengaruh besar terhadap kesempatan individu memperoleh pendidikan yang layak. Ketimpangan fasilitas sekolah, distribusi pendidik, serta kelemahan infrastruktur pendidikan menyebabkan peluang naik kelas sosial tidak terbagi secara merata di berbagai wilayah.

Sementara itu, Lenama & Knaufmone (2023) memberikan perspektif yang lebih luas mengenai hubungan pendidikan dan mobilitas sosial dengan menekankan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas diri melalui pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan posisi sosial. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu. Modal budaya, modal sosial, dan kondisi struktural turut menentukan efektivitas pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Artinya, pendidikan memang menjadi jalur utama mobilitas, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ekosistem sosial yang mendukung. Modal sosial terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama dalam masyarakat. Kepercayaan (trust) adalah elemen penting dalam keberlanjutan modal sosial, yang hanya akan terbentuk jika ada rasa saling percaya dalam hubungan sosial (Permatasari, Huda, & Swasanti, 2025).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan perluasan akses melalui program beasiswa, wajib belajar, dan pemerataan guru, ketimpangan kualitas dan fasilitas antardaerah terutama antara kota dan desa masih sangat mencolok. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya peluang mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan modal kultural. Di sisi lain, perkembangan sosial ekonomi yang semakin kompetitif menjadikan pendidikan sebagai modal utama untuk memasuki pasar kerja yang menuntut keterampilan tinggi. Tanpa pemerataan pendidikan yang memadai, akan muncul generasi yang kesulitan bersaing dan semakin tertinggal dalam struktur sosial.

Walaupun Lenama, Nudin, dan Amrullah telah mengkaji hubungan pendidikan dan mobilitas sosial, masih terdapat celah penelitian yang belum tergarap secara menyeluruh. Kajian mengenai ketimpangan pendidikan dan dampaknya terhadap mobilitas sosial cenderung dibahas secara terpisah sehingga hubungan keduanya belum dipahami secara integratif. Selain itu, analisis mengenai peran pendidikan dalam konteks ketimpangan geografis dan kelompok sosial tertentu masih terbatas, meskipun disparitas wilayah sangat berpengaruh terhadap peluang mobilitas. Penelitian yang memadukan teori mobilitas sosial dengan temuan empiris terbaru juga masih minim sehingga dinamika perubahan sosial belum terbaca secara

komprehensif. Celah-celah inilah yang melandasi pentingnya penelitian ini untuk menyusun pemahaman yang lebih utuh berdasarkan sintesis temuan Lenama, Nudin, dan Amrullah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *literature review* dengan pendekatan *scoping review* sebagaimana dijelaskan oleh Utami, Jahar, & Zulkifli (2021) . Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah secara luas dan terstruktur untuk memetakan karya-karya penelitian yang berhubungan dengan fokus kajian. Prosesnya mencakup identifikasi, pemilahan, dan pengorganisasian berbagai publikasi sehingga dapat disusun menjadi rangkuman ilmiah yang utuh dan terpadu.

Sumber data dihimpun dari berbagai basis data nasional maupun internasional, seperti ScienceDirect, PubMed, Scopus, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci mobilitas sosial, ketimpangan, dan pendidikan. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir (2021–2025) guna menjaga relevansi dan kebaruan informasi. Melalui pendekatan *scoping review* ini, penelitian bertujuan menelaah berbagai temuan terkait isu ketimpangan dan mobilitas sosial, mencakup faktor penyebab, bentuk-bentuk ketidakmerataan, serta implikasinya terhadap mobilitas sosial, sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara ketimpangan pendidikan dan peluang mobilitas dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN

A. Ketimpangan Sosial dalam Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Mobilitas

Menurut Pierre Bourdieu dalam Sahrudin (2024), kesenjangan sosial dalam pendidikan terjadi melalui proses reproduksi simbolik yang membuat sekolah bukan sekadar institusi pembelajaran, tetapi arena yang mempertahankan dominasi kelas. Melalui konsep *habitus*, *modal budaya*, dan *kekerasan simbolik*, Bourdieu menjelaskan bahwa siswa dari kelas sosial tinggi memiliki modal budaya yang selaras dengan tuntutan sekolah, sehingga lebih mudah sukses, sementara siswa dari kelas sosial bawah sering tertinggal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena struktur pendidikan yang bias terhadap budaya dominan. Sekolah elit dengan fasilitas modern memperkuat ketimpangan ini karena hanya dapat diakses kelompok bermodal ekonomi kuat, sehingga modal budaya dan keunggulan mereka terus diwariskan. *Habitus* berperan sebagai disposisi yang

terbentuk dari lingkungan sosial dan menjadi kerangka tindakan individu, namun tetap memberi ruang bagi kreativitas dan strategi, sehingga tidak bersifat sepenuhnya deterministik. Meski demikian, sistem pendidikan cenderung mengaburkan mekanisme seleksi sosial dan mengesankan bahwa semua siswa memiliki peluang yang sama. Melalui analisisnya, Bourdieu menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi terutama ketidakseimbangan modal budaya yang menentukan keberhasilan sekolah, komunikasi pendidikan, serta akses terhadap modal simbolik yang pada akhirnya memperkuat dominasi kelas menengah dan atas dalam struktur sosial.

Menurut Lenama & Knaufmone (2023), mobilitas sosial adalah proses Bergeraknya individu atau kelompok dalam struktur sosial, yang dapat mengarah pada peningkatan atau penurunan status. Mobilitas ini menggambarkan perubahan posisi sosial seseorang dalam masyarakat yang bersifat hierarkis. Karena manusia selalu berinteraksi dan beradaptasi, mobilitas sosial menjadi bagian alami dari kehidupan sosial. Pendidikan sebagai upaya terencana untuk mengembangkan potensi manusia, baik intelektual maupun kepribadian. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mentransmisikan nilai budaya, membentuk karakter, dan menyiapkan individu untuk menjalankan peran sosialnya. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh keterampilan yang meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi. Secara sosial, pendidikan memiliki fungsi penting: melestarikan budaya, mengajarkan peran sosial, menjaga integrasi masyarakat, dan membentuk kepribadian. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana strategis dalam peningkatan kualitas hidup. Pendidikan merupakan jalur utama mobilitas sosial vertikal. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat memperoleh pekerjaan lebih baik, pendapatan lebih tinggi, dan kedudukan sosial yang lebih kuat. Sekolah menyediakan ruang bagi setiap anak, tanpa melihat latar belakang sosialnya, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan status sosial. Lenama menekankan pentingnya pemerataan pendidikan. Tanpa akses pendidikan yang adil, perbedaan status sosial akan semakin melebar dan mobilitas sosial menjadi sulit terjadi. Pendidikan harus tersedia bagi seluruh warga negara, sehingga mampu menjadi instrumen perubahan sosial dan memperkuat peluang mobilitas antargenerasi. Secara keseluruhan, Lenama menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan individual, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pergerakan sosial menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan memainkan peran sentral dalam menciptakan mobilitas sosial, Melalui pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keterampilan masa depan, transformasi pendidikan dapat menjadi kekuatan utama dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika dunia modern (Nitaliya, 2025). Namun dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan sosial yang mencakup aspek ekonomi, geografi, budaya, dan kebijakan. Ketimpangan-ketimpangan inilah yang kemudian menentukan sejauh mana pendidikan dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial atau justru menjadi mekanisme reproduksi kelas sosial.

Secara teoritis, ketimpangan sosial dalam pendidikan muncul ketika akses, fasilitas, dan kualitas pendidikan tidak terdistribusi secara merata antarkelompok masyarakat. UNESCO (2023) menegaskan bahwa *equity in education* bukan sekadar kesetaraan akses masuk sekolah, namun juga kesetaraan dalam pengalaman belajar, pendanaan, mutu guru, fasilitas, hingga capaian akademik. Ketimpangan pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung secara historis dan struktural. Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keterpencilan geografis, dan marginalisasi budaya memainkan peran signifikan dalam membatasi akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok tertentu di masyarakat (Indriaty, Astriani, Sabrifha, & Aqilla, 2025).

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Tinri & Anas (2025), serta diperkuat secara empiris oleh penelitian Edo & Yasin (2024) di Sangatta Selatan yang menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin mengalami hambatan multifaktor: minim fasilitas, kurangnya waktu belajar karena harus bekerja, hingga ketidakmampuan keluarga menyediakan dukungan pendidikan.

Dalam perspektif Wicaksono, Prayoga, & Putra (2025), Nudin, (2025), Amrullah, Humaedah, & Arifin (2025) ketimpangan dalam pendidikan merupakan akar dari stagnasi mobilitas sosial. Pendidikan seharusnya menjadi instrumen mobilitas vertikal, namun ketika aksesnya terbatas, pendidikan malah mempertahankan stratifikasi sosial. Temuan ini sejalan dengan teori Bourdieu tentang modal budaya dan modal sosial, bahwa kelompok ekonomi tinggi memiliki modal lebih besar untuk mendukung keberhasilan pendidikan anak, sementara kelompok ekonomi rendah tertinggal secara sistemik.

B. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendidikan dalam Temuan Literatur dan Penelitian Lapangan

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab paling dominan ketimpangan pendidikan. Biaya pendidikan, fasilitas belajar, dan kemampuan keluarga menyediakan kebutuhan belajar merupakan faktor kunci. Penelitian Edo & Yasin (2024) menemukan secara langsung bahwa anak dari keluarga buruh dan pekerja informal hanya mampu mengakses sekolah lokal dengan fasilitas seadanya, sementara anak dari keluarga mapan atau pegawai tambang mendapatkan pendidikan berkualitas.

2. Faktor Geografis

Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi terbatas. Banyak anak di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, bahkan sebagian tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal serupa terjadi pada layanan kesehatan yang tidak merata karena kurangnya tenaga medis dan sarana kesehatan di wilayah pedalaman. (Kemendikbud, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Tinri & Anas (2025), yang menyoroti bahwa daerah tertentu memiliki beban geografis yang menyebabkan kualitas pendidikan tertinggal dan peluang mobilitas menurun drastis.

3. Faktor Sosial Budaya

Nilai budaya yang mendorong anak perempuan menikah dini, penggunaan bahasa daerah yang menghambat pendalaman pelajaran formal, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menyebabkan ketimpangan sosial semakin dalam. Hal ini konsisten dengan pandangan Nudin (2025) dan teori modal budaya dari Bourdieu, bahwa budaya keluarga sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan.

4. Faktor Kebijakan dan Manajemen Pendidikan

Birokrasi tidak efektif, distribusi guru tidak merata, nepotisme, dan ketidakserasian kurikulum dengan kondisi lokal. Temuan ini relevan dengan pendapat Tinri & Anas (2025) bahwa kebijakan top-down sering mengabaikan konteks sosial daerah, sehingga memperlebar jurang ketimpangan.

C. Dampak Ketimpangan Pendidikan dan Keterkaitannya dengan Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendidikan berdampak pada berbagai aspek sosial:

1. Kemiskinan

Anak dari keluarga miskin sulit mengakses pendidikan berkualitas sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Penelitian Edo & Yasin (2024) mengonfirmasi lingkaran kemiskinan ini secara empiris: tanpa pendidikan bermutu, anak-anak di Sangatta tidak mampu meningkatkan taraf hidup.

2. Kesenjangan Sosial

Menurut Lenama & Knaufmone (2023), pendidikan memang sarana mobilitas sosial, tetapi tanpa pemerataan mutu, pendidikan justru mereproduksi kelas sosial.

3. Kurangnya Inovasi dan Pembangunan serta Daya Saing yang Rendah

Ketimpangan akses pendidikan memperbesar jurang antara kelompok status sosial tinggi dan rendah. Temuan Wicaksono et al., (2025) menunjukkan bahwa mereka yang mengenyam pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar dalam pekerjaan formal dan prestisius.

4. Rendahnya Kualitas SDM Nasional

Ketimpangan pendidikan membuat banyak potensi manusia tidak berkembang. Fukaro (2025) menegaskan bahwa pendidikan yang merata seharusnya menciptakan SDM unggul yang mampu adaptif dan inovatif.

5. Pembangunan Daerah yang Tertinggal

Edo & Yasin (2024) menemukan bahwa daerah dengan fasilitas pendidikan minim justru memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Ini memperkuat argumen makalah bahwa pembangunan daerah berkaitan erat dengan pemerataan pendidikan.

D. Pendidikan sebagai Sarana Mobilitas Sosial: Analisis Teoretis dan Temuan Empiris

1. Pendidikan sebagai Mesin Mobilitas Vertikal

Wicaksono et al., (2025) sepakat bahwa pendidikan membuka peluang pekerjaan bergaji tinggi, menciptakan legitimasi sosial, dan meningkatkan modal manusia. Menurut Lenama & Knaufmone (2023), mobilitas sosial terjadi ketika pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah posisi sosial.

2. Hambatan Mobilitas Sosial akibat Ketimpangan

Tinri & Anas (2025) & Edo & Yasin (2024) menemukan bahwa pendidikan tidak

otomatis menjamin mobilitas sosial. Ketika aksesnya tidak merata, pendidikan gagal menjadi instrumen pemerataan sosial.

3. Interaksi Ekonomi, Budaya, dan Kebijakan

Mobilitas sosial bukan hanya dipengaruhi pendidikan, tetapi juga oleh dukungan ekonomi keluarga, nilai budaya yang mempengaruhi motivasi belajar, kebijakan negara yang memberi atau menutup akses Pendidikan, ini selaras dengan teori Bourdieu tentang habitus.

SIMPULAN

Ketimpangan sosial dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang menghambat fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Meskipun pendidikan idealnya menyediakan akses dan kesempatan yang setara, temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa mutu, akses, dan capaian pendidikan masih sangat ditentukan oleh faktor ekonomi, geografis, budaya, serta kebijakan yang tidak merata. Ketidaksetaraan fasilitas sekolah, kemampuan ekonomi keluarga, distribusi pendidik, dan nilai-nilai sosial budaya yang berbeda, sebagaimana diungkapkan oleh Wicaksono et al. (2025), Tinri & Anas (2025), Nudin (2025), serta Edo & Yasin (2024), mempertegas bahwa pendidikan belum mampu sepenuhnya menjadi jalur mobilitas vertikal yang efektif. Akibatnya, kelompok dengan modal sosial, ekonomi, dan budaya rendah memiliki peluang mobilitas yang terbatas, sedangkan kelompok yang memiliki modal lebih kuat cenderung mampu mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan masih berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kelas sosial, sejalan dengan pandangan Bourdieu. Oleh karena itu, pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, dan kebijakan afirmatif menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan mampu mendorong mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Amrullah, T., Humaedah, L., & Arifin, Z. (2025). PENDIDIKAN DAN Pengaruhnya terhadap MOBILITAS SOSIAL. *MHS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 1(2), 173–183.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak kesenjangan akses pendidikan dan faktor ekonomi keluarga terhadap mobilitas sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(3), 317–326.
- Fukaro, A. (2025). Pengaruh latar belakang sosial terhadap kesempatan pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1214–1220.

Sandi, Nurullayali Azzahro, Asep Mulyana, Sinta Khoiril Bariyyah

Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya. *PEMA*, 5(2), 551–565.

Kemendikbud. (2022). *Laporan Evaluasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lenama, A., & Knaufmone, M. (n.d.). *MOBILITAS SOSIAL DAN PENDIDIKAN*.

Nitaliya, B. (2025). PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL TENTANG PANDANGAN SOSIOLOGI TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (J-Diteksi)*, 4(1), 46–51.

Novirsari, E. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(1), 44–56.

Nudin, N. (2025). DAMPAK KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP MOBILITAS SOSIAL. *Jurnal Mitra*, 23(1), 1–10.

Permatasari, S. D. I., Huda, M. M., & Swasanti, I. (2025). Analisis Modal Sosial dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZISNU Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 89–100.

Sahrudin, S. (2024). MITOS KESEMPATAN SETARA DAN REPRODUKSI KETIMPANGAN SOSIAL: Potret Konkret Ketidakadilan Sosial dalam Pendidikan bagi Anak-anak Petani Tambak di Wilayah Pinggiran Indramayu. *Wulang: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 16–23.

Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Ketimpangan Sosial dan Akses Terhadap Teknologi: Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Di Kota Makassar. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 9–14.

UNESCO. (2023). No Title. In *Global Education Monitoring Report*.

Utami, M. C., Jahar, A. S., & Zulkifli, Z. (2021). Tinjauan scoping review dan studi kasus. *Radial*, 9(2), 152–172.

Wicaksono, A., Prayoga, A. A., & Putra, Z. R. (2025). FASILITAS EKONOMI, SOSIAL DAN PENDIDIKAN YANG BERBEDA DAN MENYEBABKAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN GENERASI MUDA UNTUK KELUAR DARI GARIS KEMISKINAN. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 1–9.

